

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kepemimpinan Gereja Dalam Perspektif Teologi

Kepemimpinan dalam gereja pada dasarnya berakar pada panggilan ilahi dan mandat pelayanan yang berasal dari Allah sendiri. Seorang pemimpin gereja tidak dipilih terutama karena keahlian manajerialnya, melainkan karena kesediaannya menanggapi seruan Tuhan untuk mengabdikan kepada umat-Nya.⁴ Dalam tradisi Kristen, kepemimpinan bukan sekadar fungsi administratif atau jabatan struktural, melainkan partisipasi aktif dalam karya penyelamatan Allah di tengah dunia.

Gereja dipahami sebagai instrumen dan saksi Kerajaan Allah, sehingga kepemimpinan di dalamnya memiliki kedalaman spiritual yang tak terpisahkan. Pola kepemimpinan yang diteladankan Yesus Kristus adalah kepemimpinan yang bersifat melayani (*servant leadership*), sebagaimana tertulis dalam Markus 10:45 bahwa Anak Manusia datang bukan untuk menerima pelayanan, melainkan untuk melayani.⁵ Pola ini menempatkan pelayanan, pengorbanan, dan kasih sebagai inti dari otoritas kepemimpinan

⁴Ardi Asso, "Prinsip Dasar Kepemimpinan Gereja: Analisis Dasar Berpijak Bagi Pemimpin Gereja Masa Kini," *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)*, 4, No. 2 (March 2024): 79–89.

⁵Andriani N, "Kepemimpinan Yang Melayani Menurut Teladan Kristus," *Diligentia: Journal of Theology and Christian Education*, 6, No. 1 (2024): 1–12.

Kristen. Teladan ini menempatkan semangat pengabdian, pengorbanan diri, dan kasih sebagai inti sejati dari otoritas kepemimpinan Kristiani.

Secara teologis, kepemimpinan gereja yang kontekstual harus bertumpu pada landasan yang kokoh agar tidak jatuh ke dalam sinkretisme atau relativisme budaya. Landasan teologis ini menjadi bingkai normatif yang menentukan batas-batas sekaligus peluang dari proses kontekstualisasi. Setidaknya terdapat tiga dimensi teologis yang perlu diperhatikan. Pertama, dimensi Kristologis, yang menguatkan bahwa Kristuslah Kepala gereja dan sumber otoritas yang tertinggi.⁶ Oleh karena itu, setiap bentuk kepemimpinan gereja wajib tunduk pada kehendak dan teladan Kristus. Otoritas pemimpin gereja bukan otoritas yang mutlak, melainkan otoritas yang bersifat delegatif dan diarahkan demi pembangunan tubuh Kristus. Kedua, dimensi *Pneumatologis*, yang menggarisbawahi peran Roh Kudus dalam memampukan dan mengarahkan para pemimpin gereja. Tanpa anugerah Roh Kudus, kepemimpinan gereja akan kehilangan daya rohaniyah dan berubah menjadi sekadar aktivitas organisasi biasa.⁷ Roh Kuduslah yang melengkapi pemimpin untuk menjalankan fungsi pastoral, pengajaran, dan pengelolaan jemaat secara bijak dan penuh kasih. Ketiga, dimensi *Eklesiologis*, yang memandang gereja sebagai tubuh Kristus di mana setiap anggota memiliki

⁶N, "Kepemimpinan Yang Melayani Menurut Teladan Kristus," 79–92.

⁷Nopriadi N, dkk, "Peran Roh Kudus Sebagai Pandangan Dalam Kehidupan Orang Percaya (Pneumatologi)," *Jurnal Magistra*, 2, No. 4 (2024): 171–78.

peran dan karunia yang unik.⁸ Dalam kerangka ini, kepemimpinan bersifat kolegal dan partisipatif, jauh dari corak individualistik atau dominatif.

Dalam konteks gereja-gereja Indonesia, termasuk Gereja Toraja, kepemimpinan tidak dapat dipisahkan dari sistem presbiterial-sinodal yang menekankan kebersamaan dalam proses pengambilan keputusan. Sistem ini mencerminkan keyakinan bahwa gereja adalah persekutuan orang-orang beriman yang dipanggil untuk berjalan bersama dalam cahaya firman Tuhan.⁹ Dengan demikian, kepemimpinan gereja bukanlah model hierarkis yang otoriter, melainkan kepemimpinan yang dialogis, musyawarah, dan berakar dalam komunitas iman. Setiap keputusan strategis idealnya lahir dari proses pertimbangan bersama antara pendeta, majelis, dan jemaat.

Namun perkembangan zaman modern kerap mendorong gereja mengadopsi model kepemimpinan manajerial yang berorientasi pada efisiensi dan pencapaian target organisasi. Pendekatan ini memang bernilai dalam hal profesionalitas, tetapi menyimpan risiko mereduksi makna kepemimpinan gereja menjadi sekadar manajemen institusi. Tantangan yang dihadapi gereja saat ini adalah bagaimana mempertahankan keseimbangan antara profesionalitas kepemimpinan dan spiritualitas pelayanan, agar gereja

⁸Andeas Laoli and Bambang Malik, "Gereja Sebagai Tubuh Kristus: Menelusuri Sejarah, Makna Dan Panggilan Kita Dalam 1 Korintus 12:12-13," *Sukacita: Jurnal Pendidikan Iman Kristen*, 2, No. 1 (2025).

⁹Bessi L. N. T, "Rekonstruksi Partisipasi Anggota Gereja Dalam Perencanaan Pelayanan Di Gereja Dengan Sistem Presbiterial Sinodal," *Fidei: Jurnal Teologi Sistematika Dan Praktika*, 8, No. 2 (2025).

tetap relevan secara organisatoris tanpa kehilangan jati dirinya sebagai komunitas iman yang dipimpin Kristus dan diperlengkapi oleh Roh Kudus.

Secara khusus, landasan teologis bagi kepemimpinan gereja kontekstual di Toraja perlu memperhatikan dua prinsip utama. Pertama, prinsip inkarnasi: sebagaimana Allah yang tak terbatas hadir dalam kekonkretan budaya manusia melalui Yesus Kristus, demikian pula kepemimpinan gereja dipanggil untuk hadir secara nyata dalam kekonkretan budaya Toraja. Ini bukan kompromi terhadap kemurnian Injil, melainkan penghayatan serius akan perintah Allah yang menjelma dalam sejarah dan budaya. Kedua, prinsip pentakosta: Roh Kudus yang turun dalam peristiwa Pentakosta (Kis. 2) berbicara dalam berbagai bahasa budaya. Ini menegaskan bahwa Injil tidak terikat pada satu bentuk budaya tunggal, melainkan dapat dihidupi dalam beragam ekspresi budaya yang bermakna. Dalam konteks Gereja Toraja, kedua prinsip ini menjadi pijakan teologis yang kokoh untuk membangun kepemimpinan yang benar-benar kontekstual: setia pada Injil sekaligus berakar dalam budaya Toraja.

B. Budaya Toraja dan Dinamika Kepemimpinan Tradisional

Masyarakat Toraja dikenal memiliki sistem sosial dan budaya yang kukuh, diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas kolektif mereka. Tatanan kehidupan sosial dibangun di atas nilai-nilai kebersamaan, hierarki adat, solidaritas dalam lingkup keluarga besar,

serta penghormatan yang dalam kepada para leluhur. Nilai-nilai ini tidak sekadar berfungsi sebagai norma sosial, melainkan juga sebagai kerangka etis yang mengatur relasi antarindividu dan antarkelompok dalam masyarakat.¹⁰ Kehidupan orang Toraja pada hakikatnya bersifat komunal: setiap keputusan dan tindakan pribadi kerap dipertimbangkan dalam kaitannya dengan kepentingan keluarga dan komunitas adat secara keseluruhan.

Sejumlah praktik budaya yang menonjol mencerminkan betapa kuatnya integrasi antara dimensi sosial, religius, dan simbolik dalam kehidupan warga Toraja. *Upacara Rambu Solo'* bukan sekadar prosesi penghormatan terakhir kepada yang telah meninggal, ia sekaligus merupakan ekspresi solidaritas sosial, penanda status dalam masyarakat, serta penegasan keyakinan tentang hubungan antara yang hidup dan yang telah berpulang. Demikian pula *Rambu Tuka'*, sebagai perayaan sukacita, menandai momen-momen penting seperti pernikahan, syukuran rumah adat, atau berkah-berkah lainnya, yang dirayakan secara bersama sebagai ungkapan syukur dan penguatan ikatan sosial.¹¹ Kedua praktik ini menunjukkan bahwa budaya Toraja memandang kehidupan secara holistik, di mana aspek spiritual, sosial, dan simbolik tidak terpisahkan.

¹⁰Payungallo K., Said, M, "Pengaruh Budaya Toraja Ma'nene' Terhadap Identitas Sosial Masyarakat Di Dusun Malombu Kecamatan Awan Rantekarua Kabupaten Toraja Utara," *Jambura History and Culture Journal*, 8, No. 1 (2026): 111–29.

¹¹Rettang L and Syukur M, "Makna Kesetaraan Dalam Upacara Rambu Solo': Pendekatan Filosofis Terhadap Struktur Sosial Budaya Toraja," *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4, No. 2 (2025): 1042–49.

Struktur kepemimpinan tradisional Toraja terwujud melalui sistem adat yang mengutamakan musyawarah, hierarki sosial, serta peran sentral tokoh adat. Kepemimpinan tidak dipahami semata sebagai posisi struktural, melainkan sebagai amanah moral untuk menjaga keseimbangan dan kerukunan komunitas. Seorang pemimpin adat bukan hanya pengambil keputusan, ia adalah perwujudan nilai-nilai luhur budaya, penjaga keteraturan sosial, sekaligus tokoh yang dihormati karena integritasnya dan kearifan yang ia miliki.

Dalam konteks gereja, nilai-nilai budaya tersebut tidak dapat diabaikan. Kepemimpinan gereja di Toraja senantiasa berinteraksi dengan ekspektasi budaya masyarakat yang menjunjung tinggi kebersamaan, penghormatan terhadap struktur, dan relasi kekeluargaan. Oleh karena itu, model kepemimpinan gereja yang efektif dan relevan harus mampu memahami serta berdialog dengan sistem nilai ini. Tanpa kepekaan terhadap konteks budaya, kepemimpinan gereja berpotensi dipandang asing atau kurang berakar dalam kehidupan nyata jemaat yang hidup di tengah tradisi dan struktur sosial Toraja yang kuat.

C. Kepemimpinan Alkitabiah: Musa dan Yesus dalam Konteks Sosial, Budaya, dan Politik

Kajian tentang kepemimpinan gereja kontekstual tidak dapat berhenti pada prinsip teologis yang bersifat umum, melainkan perlu ditelusuri lebih

dalam melalui teladan kepemimpinan tokoh-tokoh Alkitab yang lahir dan dibentuk dalam pergumulan sosial, budaya, dan politik zamannya. Dua tokoh yang menjadi rujukan utama kepemimpinan Alkitabiah adalah Musa dalam Perjanjian Lama dan Yesus Kristus dalam Perjanjian Baru. Keduanya menunjukkan bahwa kepemimpinan yang berakar dan berotoritas ilahi tidak pernah lepas dari konteks sosial dan politik tempat kepemimpinan itu dijalankan.

1. Kepemimpinan Musa dalam Konteks Perbudakan dan Pembentukan Bangsa Israel

Kepemimpinan Musa tidak dapat dipahami secara utuh tanpa memahami konteks sosial-politik yang melatarinya, yaitu perbudakan bangsa Israel di Mesir di bawah kekuasaan Firaun. Bangsa Israel pada masa itu adalah kelompok etnis minoritas yang tidak memiliki kekuatan politik maupun ekonomi, diperas tenaganya untuk kepentingan proyek pembangunan kerajaan Mesir (Kel. 1:11-14). Dalam situasi penindasan struktural inilah Allah memanggil Musa, seorang yang justru dibesarkan dalam istana Firaun namun kemudian hidup sebagai buronan di padang gurun Midian, untuk menjadi pembebas bangsanya.¹² Latar belakang Musa yang unik ini yaitu berasal dari bangsa tertindas tetapi dibentuk

¹² "Jejak-Jejak Pengutusan Musa Membebaskan Bangsa Israel Dari Perbudakan Mesir (Keluaran 6:1-12)," *Student Scientific Creativity Journal*, diakses 2026.

dalam kultur elite Mesir dan kemudian ditempa kembali dalam kesederhanaan hidup sebagai gembala di Midian, menampakkan bahwa kepemimpinan Alkitabiah sering kali dibentuk melalui pergumulan lintas kelas sosial dan lintas budaya, bukan melalui jalur karier yang linear dan nyaman.

Secara politik, panggilan Musa untuk berhadapan langsung dengan Firaun (Kel. 5:1) merupakan tindakan kepemimpinan yang berisiko tinggi, karena bermakna konfrontasi terbuka terhadap kekuasaan politik terbesar di kawasan tersebut pada masanya. Musa memimpin bukan dengan mengandalkan kekuatan militer atau status sosial, melainkan dengan otoritas yang bersumber dari panggilan dan penyertaan Allah sendiri (Kel. 3:12).¹³ Sepanjang perjalanan di padang gurun, kepemimpinan Musa terus diuji oleh dinamika sosial bangsa Israel yang baru saja keluar dari sistem perbudakan dan belum memiliki pengalaman hidup sebagai bangsa yang merdeka, ditandai oleh gerutuan, protes, dan pemberontakan berulang (Kel. 14:11; 16:2-3; 17:3; Bil. 14:1-4). Pengalaman ini membentuk Musa menjadi pemimpin yang harus menggabungkan peran kharismatik sebagai penerima wahyu,

¹³ "Kajian Teologis Kepemimpinan Musa," diakses melalui ResearchGate, 2020.

peran administratif sebagai penata kehidupan bangsa yang besar, dan peran penyelesai konflik di tengah krisis berkelanjutan.¹⁴

Satu peristiwa penting yang memperlihatkan kematangan kepemimpinan Musa adalah nasihat mertuanya, Yitro, agar Musa mendelegasikan sebagian tugas pengadilan kepada para pemimpin atas seribu, seratus, lima puluh, dan sepuluh orang (Kel. 18:13-27). Peristiwa ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Alkitabiah bukanlah kepemimpinan yang menutup diri dari masukan lintas budaya, sebab Yitro sendiri adalah seorang imam Midian, di luar bangsa Israel, tetapi kepemimpinan yang terbuka untuk belajar dan mendistribusikan kekuasaan demi keberlanjutan pelayanan kepada umat.¹⁵ Dengan demikian, kepemimpinan Musa memperlihatkan pola yang khas, yaitu otoritas ilahi yang dijalankan di tengah realitas sosial-politik penindasan, dipertajam melalui pergumulan lintas budaya, dan didewasakan melalui kesediaan untuk berbagi kepemimpinan.

¹⁴"Model Kepemimpinan Berkelanjutan: Sebuah Kajian Kritis Kepemimpinan Dan Manajemen Tokoh Musa Berdasarkan Keluaran 18:1-27," diakses melalui ResearchGate, 2022.

¹⁵Yakob Tomatala, dikutip dalam "Penerapan Prinsip-Prinsip Kepemimpinan Musa Dalam Pelayanan," *Theosophia*, STT IKS Marturia.

2. Kepemimpinan Yesus dalam Konteks Sosial-Politik Yudaisme Abad Pertama

Kepemimpinan Yesus Kristus juga tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, budaya, dan politik Palestina abad pertama, yaitu masyarakat Yahudi yang hidup di bawah penjajahan Kekaisaran Romawi sekaligus di bawah otoritas keagamaan imam-imam besar Bait Allah yang cenderung menjadi benteng konservatisme agama dan mengklaim kedudukan sakral yang menuntut ketundukan umat.¹⁶ Struktur sosial masyarakat Yahudi saat itu juga sangat hierarkis dan berlapis, dengan kelompok elite keagamaan dan politik yang menguasai sumber daya, berhadapan dengan mayoritas rakyat kecil, petani, nelayan, dan kelompok yang dianggap tidak layak secara religius seperti pemungut cukai dan orang berdosa.

Dalam konteks kekuasaan yang bercorak dominatif inilah Yesus mengajarkan pola kepemimpinan yang radikal berbeda. Ketika para murid memperebutkan kedudukan yang lebih tinggi, Yesus menegaskan bahwa pola kepemimpinan dunia, yang direpresentasikan oleh raja-raja bangsa yang memerintah dengan kekuasaan, tidak boleh menjadi model bagi para pengikut-Nya. Sebaliknya, siapa yang ingin menjadi terkemuka

¹⁶Yahya Wijaya, "Kepemimpinan Yesus Sebagai Acuan Bagi Kepemimpinan Gereja," *Jurnal Jaffray*, 71.

harus menjadi pelayan (Mat. 20:25-28; Mrk. 10:42-45; Luk. 22:25-26).¹⁷ Ajaran ini disampaikan dalam konteks sosial-ekonomi masyarakat Yahudi yang telah dibentuk oleh hierarki kekuasaan Romawi dan struktur kelas yang tajam, sehingga pernyataan Yesus bukan sekadar nasihat moral abstrak, melainkan kritik sosial-politik yang tajam terhadap logika kekuasaan pada zamannya.¹⁸

Yesus juga secara konsisten menunjukkan keberpihakan kepada kelompok masyarakat yang terpinggirkan secara sosial dan religius, seperti penyembuhan pada hari Sabat yang melampaui aturan formal keagamaan demi belas kasihan terhadap manusia yang menderita.¹⁹ Sikap ini menempatkan Yesus dalam posisi berhadapan dengan otoritas keagamaan yang berkuasa, sekaligus memperlihatkan bahwa kepemimpinan-Nya bersifat profetik-kritis, berani mempersoalkan struktur kekuasaan yang menindas, namun dijalankan dengan kasih dan bukan dengan kekerasan. Puncak dari pola kepemimpinan pelayan ini termanifestasi dalam kerelaan Yesus menanggung penderitaan hingga kematian di kayu salib demi keselamatan manusia (Mrk. 10:45), sebuah

¹⁷"Kajian Kepemimpinan Gaya Yesus Menjadi Pola Kepemimpinan Kristen," *Didasko: Jurnal Teologi*.

¹⁸"Tafsir Sosial-Ekonomis Dari Ajaran Kepemimpinan Yesus (Matius 20:25-28)," *Humanisa: Jurnal Humaniora*.

¹⁹Yahya Wijaya, "Kepemimpinan Yesus Sebagai Acuan Bagi Kepemimpinan Gereja," *Jurnal Jaffray*, 71.

tindakan kepemimpinan yang sepenuhnya membalikkan logika kekuasaan duniawi.

3. Implikasi Kepemimpinan Alkitabiah bagi Kepemimpinan Gereja Kontekstual

Membaca kepemimpinan Musa dan Yesus secara bersamaan dalam konteks sosial, budaya, dan politiknya masing-masing menghasilkan sejumlah implikasi penting bagi kepemimpinan gereja kontekstual di Toraja. Pertama, kepemimpinan Alkitabiah selalu lahir dan diuji dalam konteks sosial yang konkret, bukan dalam ruang hampa budaya. Sebagaimana Musa dibentuk dalam pergumulan pembebasan dari perbudakan Mesir dan Yesus dibentuk dalam pergumulan melawan dominasi religius-politik Yahudi- Romawi, kepemimpinan gereja di Toraja juga mesti dibaca dan dijalankan dalam pergumulan konkretnya sendiri, yaitu pergumulan menjembatani sistem gerejawi dengan struktur adat yang kuat.

Kedua, kedua tokoh ini menampilkan otoritas kepemimpinan yang tidak bersandar pada kekuasaan struktural atau status sosial, melainkan pada panggilan ilahi yang diwujudkan dalam pelayanan. Prinsip ini menjadi koreksi teologis terhadap kecenderungan menempatkan status sosial, termasuk nilai *sugi'* dalam budaya Toraja, sebagai prasyarat utama kepemimpinan. Ketiga, keduanya menunjukkan

bahwa kepemimpinan Alkitabiah bersifat terbuka terhadap pembelajaran lintas budaya sebagaimana Musa belajar dari Yitro, sekaligus tetap kritis dan profetik terhadap struktur kekuasaan yang menindas sebagaimana Yesus menantang otoritas keagamaan pada zamannya. Kedua sikap ini, terbuka sekaligus kritis, menjadi kerangka penting bagi kepemimpinan gereja Toraja dalam menyikapi budaya lokalnya sendiri.

D. Perjumpaan Injil dan Budaya

Awal masuknya penginjilan di Toraja berlangsung dalam konteks perubahan sosial dan politik pada awal abad ke-20, ketika pemerintah kolonial Belanda mulai menancapkan pengaruhnya di wilayah Sulawesi Selatan bagian pegunungan. Sebelum periode tersebut, masyarakat Toraja relatif terisolasi secara geografis dan mempertahankan sistem kepercayaan tradisional yang dikenal sebagai *Aluk Todolo*, yakni sistem religi leluhur yang mengatur seluruh aspek kehidupan sosial, ritus, dan struktur adat. Kehidupan masyarakat diatur oleh norma adat yang kuat, kepemimpinan *tongkonan* (rumah adat sebagai pusat kekerabatan), serta berbagai ritus seperti upacara kematian dan syukuran yang sarat makna religius dan sosial.²⁰ Dalam konteks inilah pekabaran Injil mulai diperkenalkan.

²⁰Yosep Rendi and Novita Vemiantri, "Analisis Pertumbuhan Gereja Toraja Karena Pemberitaan Injil Atau Budaya Di Toraja," *In Theos: Jurnal Pendidikan Dan Theologi*, 5, No. 2 (2024).

Secara resmi, penginjilan di Toraja dimulai pada tahun 1913 oleh badan misi dari Belanda, yaitu *Gereformeerde Zendingsbond* (GZB), sebuah lembaga zending dari tradisi *Gereformeerd*. Kehadiran zending ini berkaitan erat dengan ekspansi pemerintahan kolonial Belanda yang ingin menstabilkan wilayah pegunungan sekaligus membatasi pengaruh kerajaan-kerajaan Islam di pesisir.²¹ Meskipun demikian, misi zending tidak semata-mata merupakan perpanjangan tangan kolonialisme, melainkan memiliki agenda spiritual dan pendidikan yang jelas, yaitu memberitakan Injil dan membangun komunitas Kristen yang mandiri.

Tokoh sentral dalam tahap awal penginjilan adalah A.A. van de Loosdrecht, yang tiba di Rantepao pada 10 November 1913. Ia menjadi *zendeling* pertama yang secara khusus melayani di Toraja. Van de Loosdrecht menyadari bahwa pendekatan konfrontatif terhadap adat tidak akan efektif, sehingga ia menempuh strategi pendidikan sebagai pintu masuk utama pekabaran Injil. Ia mendirikan sekolah-sekolah rakyat, mengajarkan baca-tulis, serta memperkenalkan nilai-nilai Kristen melalui pendidikan formal. Melalui jalur pendidikan ini, generasi muda Toraja mulai diperkenalkan pada ajaran Kristen secara sistematis.²² Pendekatan ini perlahan membuka ruang dialog antara Injil dan budaya lokal.

²¹Banne S. H. P. S and Supriyanto T, "Pendidikan Yang Misioner Afirmatif: Sebuah Penelusuran Konsep Dan Praksis Pendidikan Lembaga Penginjilan GZB Di Toraja," *EPIGRAPHE: Jurnal Teologi Dan Pelayanan Kristiani*, 6, No. 1 (Mei 2022): 101–17.

²²Rendi and Vemiantri, "Analisis Pertumbuhan Gereja Toraja Karena Pemberitaan Injil Atau Budaya Di Toraja."

Namun, proses penginjilan tidak berjalan mulus. Pada masa awal, sebagian masyarakat dan pemimpin adat memandang kekristenan sebagai ancaman terhadap tatanan tradisional dan struktur kekuasaan adat. Ketegangan sosial dan politik pun muncul, yang berpuncak pada peristiwa tragis tahun 1917 ketika Van de Loosdrecht terbunuh dalam sebuah konflik lokal. Peristiwa ini sempat mengguncang pelayanan *zending*, tetapi tidak menghentikan gerakan penginjilan. Sebaliknya, para *zendeling* berikutnya melanjutkan pelayanan dengan pendekatan yang lebih hati-hati dan kontekstual.

Memasuki dekade 1920-an dan 1930-an, jumlah orang Toraja yang menerima baptisan semakin bertambah. Pendidikan Kristen berkembang pesat, dan terbentuklah jemaat-jemaat lokal yang lebih terorganisir. Selain pendidikan, pelayanan kesehatan dan pembinaan sosial turut memperkuat penerimaan masyarakat terhadap gereja. Penginjilan tidak hanya dipahami sebagai perubahan agama, tetapi juga sebagai bagian dari transformasi sosial yang membawa pembaruan dalam bidang pendidikan, etika kerja, dan pola hidup masyarakat.

Puncak dari proses panjang tersebut terjadi pada tahun 1947 ketika gereja di Toraja berdiri secara mandiri dengan nama Gereja Toraja. Kemandirian ini menandai peralihan dari gereja misi menjadi gereja pribumi

yang otonom, dipimpin oleh orang Toraja sendiri.²³ Sejak saat itu, gereja berkembang pesat dan menjadi salah satu institusi paling berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Toraja, tidak hanya dalam aspek spiritual, tetapi juga sosial dan kultural.

Dengan demikian, awal penginjilan di Toraja merupakan proses historis yang kompleks, melibatkan interaksi antara misi Barat, kekuasaan kolonial, struktur adat, dan dinamika kepercayaan lokal. Proses tersebut tidak hanya menghasilkan pertumbuhan gereja secara kuantitatif, tetapi juga membentuk karakter kekristenan Toraja yang terus bergumul dalam dialog antara Injil dan budaya hingga masa kini.

Perjalanan panjang penginjilan tersebut kemudian mencapai sebuah momentum reflektif yang penting dalam peringatan 100 tahun masuknya Injil di Toraja sekitar tahun 2013. Momen ini tidak hanya dipahami sebagai perayaan historis atas kehadiran Injil sejak tahun 1913 oleh *Gereformeerde Zendingsbond*, tetapi juga sebagai kesempatan bagi Gereja Toraja untuk melakukan evaluasi teologis dan etis terhadap perjalanan imannya. Dalam refleksi tersebut, gereja menyadari bahwa meskipun Injil telah membawa perubahan besar dalam bidang pendidikan, kehidupan sosial, dan pertumbuhan gereja, proses perjumpaan antara Injil dan budaya Toraja masih terus berlangsung dan belum sepenuhnya selesai.

²³Cristienancy Dharmayu and dkk, "Gereja Toraja Jemaat Rantepao Klasik Rantepao 1935 2019," *Attoriolong: Jurnal Pemikiran Kesejarahan Dan Pendidikan Sejarah*, 19, No. 1 (2021): 102–13.

Dinamika perjumpaan ini tampak dalam adanya upaya kontekstualisasi Injil terhadap budaya lokal yang berakar pada *Aluk Todolo*. Gereja berusaha untuk tidak menolak budaya secara keseluruhan, melainkan menafsirkan dan memurnikannya dalam terang Injil. Namun, dalam prakteknya masih ditemukan ketegangan antara nilai adat dan ajaran Kristen, terutama dalam aspek kehidupan etis seperti perkawinan, relasi keluarga, dan praktik sosial lainnya.²⁴ Hal ini menunjukkan bahwa Injil belum sepenuhnya dihayati sebagai dasar hidup, melainkan seringkali berjalan berdampingan atau bahkan bercampur dengan pemahaman adat.

Oleh karena itu, momen 100 tahun Injil di Toraja menjadi pengingat bahwa tugas gereja tidak berhenti pada pewartaan Injil, tetapi juga pada pembentukan kehidupan iman dan moral jemaat secara berkelanjutan. Gereja dipanggil untuk terus membimbing jemaat agar mampu hidup setia kepada Injil di tengah kuatnya pengaruh budaya, sehingga perjumpaan antara Injil dan budaya tidak hanya bersifat kompromi, tetapi benar-benar menghasilkan transformasi hidup yang mencerminkan nilai-nilai Kerajaan Allah.

Perjumpaan antara Teologi Kristen dan budaya Toraja menghadirkan dinamika yang kompleks dan tidak selalu sederhana. Ketika Injil hadir dalam suatu kebudayaan, ia tidak berdiri di ruang hampa, melainkan berinteraksi

²⁴Yan Malino and Daniel Ronda, "Sejarah Pendidikan Sekolah Kristen Gereja Toraja: Suatu Kajian Historis Kritis Tentang Peran Gereja Toraja Melaksanakan Pendidikan Sekolah Kristen Dari Masa Zending Sampai Era Reformasi," *Jurnal Jaffray*, 12, No. 1 (2014): 36–37.

dengan sistem nilai, simbol, dan praktik yang telah hidup dan mengakar dalam masyarakat.²⁵ Dalam konteks Toraja, terdapat banyak nilai budaya yang memiliki titik temu dengan prinsip-prinsip Injil, seperti solidaritas komunal, semangat gotong royong, penghormatan terhadap komunitas, dan tanggung jawab moral terhadap sesama. Nilai-nilai tersebut dapat menjadi jembatan bagi pewartaan dan penghayatan iman Kristen. Namun demikian, tidak semua unsur budaya dapat diterima begitu saja. Ada aspek-aspek tertentu yang perlu dikaji dan dikritisi secara teologis agar tidak bertentangan dengan pengakuan iman kepada Kristus sebagai Tuhan dan Kepala Gereja.

Secara analitis, perjumpaan antara Teologi dan budaya ini dapat dipahami melalui tiga pola utama. Pertama, pola akomodasi, yaitu ketika gereja menerima unsur-unsur budaya secara selektif dan menempatkannya dalam praktik kehidupan bergereja tanpa banyak perubahan makna.²⁶ Dalam pola ini, gereja berusaha menyesuaikan diri dengan konteks sosial agar tetap relevan. Kedua, pola konfrontasi, yaitu ketika gereja secara tegas menolak unsur budaya yang dinilai tidak sejalan dengan ajaran iman Kristen. Sikap ini biasanya muncul ketika praktik budaya dianggap mengandung makna religius atau simbolik yang bertentangan dengan pengakuan iman kepada

²⁵Soegianto, "The Relationship between the Gospel and Culture: A Theological Analysis and Social Perspective in a Contemporary Context," *Theological Journal Kerugma*, 7, No. 2 (2024).

²⁶Mawikere M. C. S and Hura S, "Studi Mengenai Karakteristik Budaya Dan Multi Wajah Model Teologi Kontekstualisasi Injil," *Jurnal Teologi Berita Hidup*, 5, No. 2 (March 2023): 468–94.

Allah Tritunggal.²⁷ Ketiga, pola transformasi, yakni pendekatan di mana gereja tidak sekedar menerima atau menolak, tetapi mengolah dan memperbarui nilai budaya dalam terang Injil.

Model transformasi dipandang sebagai pendekatan yang paling relevan bagi kepemimpinan gereja kontekstual, karena memungkinkan terjadinya dialog kreatif antara iman dan budaya. Dalam pola ini, budaya tidak dihapus atau dianggap musuh, melainkan dimaknai ulang berdasarkan nilai-nilai Kerajaan Allah. Misalnya, solidaritas yang terwujud dalam berbagai upacara adat dapat ditransformasikan menjadi ekspresi kasih Kristen dan persekutuan tubuh Kristus.²⁸ Dengan demikian, kepemimpinan gereja tidak hanya bersikap reaktif terhadap budaya, tetapi proaktif dalam menuntun jemaat untuk melihat dan menghidupi budaya sebagai ruang kesaksian iman yang diperbarui oleh Injil.

E. Pembentukan Model Kepemimpinan Kontekstual Toraja

Pembentukan model kepemimpinan gereja kontekstual di Toraja tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan melalui proses refleksi teologis yang mendalam dan dialog yang berkelanjutan dengan realitas budaya setempat. Model ini lahir dari kesadaran bahwa gereja hidup dan melayani di

²⁷"The Relationship between the Gospel and Culture: A Theological Analysis and Social Perspective in a Contemporary Context," 84-92.

²⁸Hiebert P. G, "Anthropological Insights for Missionaries: Cultural Transformation in Contextualization," *International Journal of Frontier Missions*, 31, No. 1 (2014): 3-12.

tengah masyarakat dengan identitas budaya yang kuat. Oleh karena itu, kepemimpinan gereja harus mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip teologi Kristen dengan nilai-nilai budaya Toraja secara kritis, selektif, dan transformatif.

Secara konseptual, proses pembentukan model kepemimpinan ini bertumpu pada tiga pondasi utama. Pertama, fondasi teologis, yaitu pemahaman bahwa Kristus adalah Kepala Gereja dan teladan utama kepemimpinan yang melayani. Kepemimpinan gereja harus berakar pada spiritualitas pelayanan, pengorbanan, dan kasih, bukan pada dominasi kekuasaan.²⁹ Dimensi Kristologis, Pneumatologis, dan Eklesiologis menjadi kerangka normatif yang menuntun arah dan tujuan kepemimpinan. Dengan demikian, setiap bentuk integrasi budaya harus tetap diuji dalam terang firman Tuhan dan pengakuan iman gereja.

Kedua, fondasi kultural, yakni pengakuan bahwa masyarakat Toraja memiliki sistem nilai yang membentuk pola relasi dan kepemimpinan tradisional. Nilai kebersamaan, musyawarah, solidaritas keluarga besar, serta penghormatan terhadap struktur sosial menjadi elemen penting yang tidak dapat diabaikan. Dalam konteks ini, gereja khususnya Gereja Toraja dipanggil untuk memahami dinamika budaya seperti yang tercermin dalam praktik

²⁹Juanda Yulianus, "Makna Kristus Sebagai Kepala Gereja Menurut Efesus 5:22–23 Dan Implikasinya Bagi Pembangunan Tubuh Kristus," *REDOMINATE: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani*, 3, No. 2 (2024): 1–12.

Rambu Solo' dan *Rambu Tuka'*, yang menegaskan kuatnya solidaritas dan identitas komunal masyarakat.³⁰ Nilai-nilai tersebut dapat menjadi sumber inspirasi dalam membangun kepemimpinan yang partisipatif dan kontekstual.

Ketiga, fondasi dialogis-transformatif, yaitu proses perjumpaan antara teologi dan budaya yang menghasilkan sintesis baru dalam praksis kepemimpinan. Dalam tahap ini, gereja tidak sekadar mengadopsi pola kepemimpinan adat, tetapi menafsirkannya kembali dalam terang Injil. Misalnya, prinsip musyawarah dalam struktur adat dapat diperkaya dengan prinsip kolegialitas dalam sistem presbiterial-sinodal gereja.³¹ Demikian pula, konsep kepemimpinan moral dalam tradisi adat dapat diperdalam melalui pemahaman kepemimpinan sebagai panggilan ilahi dan pelayanan pastoral.

Dengan demikian, pembentukan model kepemimpinan gereja kontekstual di Toraja merupakan hasil integrasi kreatif antara iman dan budaya. Model ini bukan kompromi terhadap teologi, melainkan ekspresi inkarnasional gereja yang hadir secara nyata di tengah masyarakatnya. Kepemimpinan yang terbentuk melalui proses ini diharapkan mampu menjawab tantangan zaman modern tanpa kehilangan identitas spiritual dan

³⁰Usuf N and Simanjuntak A, "Kearifan Lokal Toraja: Nilai Sosial Dan Struktur Komunal Dalam Kehidupan Masyarakat," *Jurnal Antropologi Indonesia*, 8, No. 2024 (n.d.): 220–36.

³¹Stephen B. Bevans, *Models of Contextual Theology* (Orbis Books, 2018), 89–105.

kulturalnya, sehingga gereja tetap relevan, otentik, dan transformatif dalam menjalankan misinya.

Berdasarkan analisis teologis dan kultural, model kepemimpinan gereja kontekstual di Toraja merupakan hasil integrasi antara prinsip iman Kristen dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat Toraja. Model ini tidak hanya menekankan efektivitas organisasi, tetapi juga kesetiaan teologis dan kepekaan kultural. Dalam konteks pelayanan di Gereja Toraja, kepemimpinan harus mampu menjembatani sistem gerejawi dengan struktur sosial adat yang telah mengakar kuat dalam kehidupan jemaat.

1. Kepemimpinan Partisipatif-Komunal

Konsep ini menekankan pentingnya kebersamaan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam budaya Toraja, musyawarah merupakan mekanisme sosial yang dijunjung tinggi untuk mencapai mufakat. Prinsip ini dapat diintegrasikan secara harmonis dengan sistem presbiterial-sinodal gereja yang menempatkan majelis dan jemaat sebagai bagian aktif dalam kepemimpinan.³² Pemimpin gereja tidak bertindak secara individualistik atau otoriter, melainkan membangun ruang dialog, mendengar aspirasi jemaat, dan menghargai hikmat kolektif. Dengan demikian, kepemimpinan menjadi representasi persekutuan tubuh Kristus yang hidup dalam semangat kebersamaan.

³²“The Relationship between the Gospel and Culture: A Theological Analysis and Social Perspective in a Contemporary Context,” 84–92.

2. Kepemimpinan Transformatif-Kultural

Menuntut kemampuan pemimpin untuk membaca dan menafsir budaya dalam terang Injil. Budaya tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai konteks di mana Injil dihidupi. Namun, penerimaan terhadap budaya tidak bersifat tanpa kritik. Pemimpin gereja dipanggil untuk melakukan proses transformasi, yaitu memperbarui makna nilai-nilai budaya agar selaras dengan prinsip Kerajaan Allah.³³ Pembaruan ini dilakukan tanpa memutuskan akar tradisi, sehingga gereja tetap relevan dan berakar dalam identitas masyarakat Toraja. Dengan pendekatan ini, gereja menjadi agen transformasi yang membarui budaya dari dalam, bukan menghancurkannya dari luar.

3. Kepemimpinan Pastoral-Kontekstual

Berfokus pada kepekaan terhadap realitas konkret kehidupan jemaat. Dalam masyarakat Toraja, relasi kekerabatan, struktur tongkonan, serta dinamika adat sangat mempengaruhi kehidupan sosial dan spiritual umat. Pemimpin gereja harus memahami kompleksitas ini agar pelayanan yang diberikan tidak bersifat abstrak atau terlepas dari konteks.³⁴ Penggembalaan dilakukan dengan memperhatikan situasi keluarga, konflik adat, beban ekonomi akibat tuntutan sosial, serta

³³Ebenhaizer I. Nuban Timo, "Gereja Dan Kebudayaan: Sebuah Refleksi Teologis," *Waskita: Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 3, No. 1 (2015): 45–60.

³⁴Simon, "Tongkonan Sebagai Basis Relasi Sosial Dan Implikasinya Bagi Pelayanan Gereja Toraja," *Jurnal Jaffray*, 16, No. 1 (2018): 1–18.

kebutuhan spiritual jemaat. Dengan demikian, kepemimpinan menjadi hadir secara nyata dalam kehidupan sehari-hari umat.

4. Kepemimpinan Profetik-Kritis

Merupakan dimensi yang menjaga kemurnian kesaksian gereja. Dalam situasi tertentu, praktik budaya dapat bertentangan dengan nilai Injil, misalnya ketika terjadi tekanan sosial yang berlebihan atau praktik yang mengaburkan iman kepada Kristus. Dalam kondisi demikian, pemimpin gereja harus berani menyuarakan kebenaran Injil secara bijaksana namun tegas. Sikap profetik ini bukan bertujuan merusak harmoni sosial, melainkan menghadirkan pembaruan yang setia pada firman Tuhan.³⁵ Kepemimpinan yang profetik memastikan bahwa gereja tetap menjadi terang dan garam di tengah budaya.

Secara keseluruhan, model ini menempatkan pemimpin gereja bukan sekadar sebagai administrator organisasi, tetapi sebagai teolog praktis dan pandu budaya. Ia harus mampu merefleksikan iman secara mendalam sekaligus menavigasi dinamika sosial masyarakatnya. Dengan demikian, kepemimpinan gereja di Toraja menjadi ruang pertemuan kreatif antara iman dan budaya, di mana Injil dihidupi secara otentik dalam konteks kehidupan masyarakat Toraja.

³⁵Binsar Jonathan Pakpahan, "Teologi Publik Dan Peran Profetik Gereja Di Ruang Publik," *Gema Teologika*, 4, No. 2 (2019): 131–50.